

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku atau Sumber Lainnya

- Arpani, W., & Halmawati. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*.
- Christia, A., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Jurnal hukum*, 151-152.
- Jati, W. R. (2012). Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi. *Jurnal Konstitusi*.
- Karenina, S., & Andayani, k. (2021). Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010-2019. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 31-33.
- Keen, M., & Joel, S. (2017). Optimal tax administration. *Journal of Public Economics*.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Pulungan, D., & Lisnawati, S. (2021). Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. *Jurnal Lex Specialis*.
- Sasana, H. (2009). Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 106-107.

Shoba, A. (2022). Kemandirian Keuangan Daerah Berdasarkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9-11.

Soeharjoto. (2018). Peta Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi, dan Manajemen Bisnis*.

Waluyo. (2002). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.

## **2. Dokumen Publik atau Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara  
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,  
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan  
Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2019 tentang pajak  
daerah

Peraturan Bupati Kabupaten Banjarnegara tentang Tata Cara Penghitungan Besaran  
alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa